



BUPATI BULELENG

JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN BULELENG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.,.

.

HARI RABU, 13 JULI 2023

YTH. KETUA, WAKIL KETUA BESERTA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULELENG.

YANG KAMI HORMATI,

1. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
2. KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, BESERTA PARA ASISTEN,
4. PARA STAF AHLI BUPATI BULELENG,
5. PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG,
6. PARA DIREKTUR BUMD KABUPATEN BULELENG,
7. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BULELENG,
8. KETUA BAWASLU KABUPATEN BULELENG,
9. PARA PIMPINAN PARPOL SE-KABUPATEN BULELENG,

10. PARA AWAK MEDIA BAIK MEDIA CETAK MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK KABUPATEN BULELENG, DAN
11. PARA UNDANGAN LAINNYA YANG BERBAHAGIA.

“*OM SWASTYASTU*”

“*ASSALAM MUALAIKUM WARAMATULLAHI WABARAKATUH*”

“*SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.*”

“*SHALOM*”

“*NAMO BUDHAYA*”

“*SALAM KEBAJIKAN*”

SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BULELENG MARILAH KITA MENGHATURKAN SESANTI ANGAYU BAGIA KEHADAPAN IDA SANG HYANG WIDHI WASA/TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA-NYA KITA DAPAT BERKUMPUL DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT DALAM RANGKA PENYAMPAIAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BULELENG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SETELAH MENDENGAR PEMANDANGAN UMUM DARI MASING-MASING FRAKSI DPRD KABUPATEN BULELENG YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI MELALUI JURU BICARANYA YAITU SDR. KADEX SUMARDIKA DARI FRAKSI PARTAI PDI-PERJUANGAN, FRAKSI PARTAI GERINDRA DAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT PERINDO. SDR. I KETUT DODY TRISNA ADI DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR, I NYOMAN MELIUN DARI FRAKSI PARTAI NASDEM, SERTA SDR. WAYAN TEREN, S.H. DARI FRAKSI PARTAI HANURA MAKA PADA KESEMPATAN PERTAMA KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA

ATAS APRESIASI YANG TELAH DIBERIKAN TERHADAP RAIHAN CAPAIAN OPINI WTP DARI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. TENTUNYA KAMI SANGAT SEPENDAPAT BAHWA CAPAIAN OPINI WTP BUKANLAH AKHIR DARI TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN, MELAINKAN GAMBARAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGAR SEGALA SUMBER DAYA KEUANGAN DAERAH DITUJUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. KAMI MENGAJAK SELURUH PIHAK UNTUK BERSAMA-SAMA MENGAWAL PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASI PADA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI-REKOMENDASI YANG DIBERIKAN OLEH BPK SERTA MENDUKUNG GERAKAN ANTI KORUPSI. PADA KESEMPATAN INI PULA KAMI AKAN MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI YANG BERISI MASUKAN DAN PANDANGAN DARI MASING-MASING FRAKSI SEBAGAI BERIKUT :

I. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA, DAN FRAKSI DEMOKRAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA,

1. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH TERUS BERKOMITMEN MELAKUKAN STRATEGI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI, MAMPU MEMBERKAN MULTIPLIER EFFECT BAGI PENINGKATAN DAYA BELI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BULELENG, PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SERTA PENGANGGURAN, PADA PRINSIPNYA KAMI SANGAT SEPENDAPAT AGAR ANGGARAN YANG DIRENCAKANAN DIARAHKAN UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT BULELENG. DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH, PADA TAHUN 2022 PEMERINTAH DAERAH

TELAH MELAKSANAKAN BEBERAPA STRATEGI YAITU PELATIHAN, PEMBINAAN DAN PROMOSI UMKM, SERTA MENERAPKAN SISTEM PENDAMPINGAN OLEH TIM PENDAMPING YANG MELIBATKAN INSTANSI TERKAIT DARI PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH, KEMUDAHAN BERUSAHA, PENDEKATAN PELAYANAN PUBLIK KE MASYARAKAT DAN MEMAKSIMALKAN TENAGA MASYARAKAT SEKITAR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM FISIK ATAU PADAT KARYA, MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN DAN MENDORONG KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA, MEMAKSIMALKAN PERANAN DUNIA PENDIDIKAN DAN BUMD DALAM MENDORONG PEMASARAN DIGITAL UNTUK PRODUK UMKM DAN PERTANIAN, MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR TERUTAMA AIR BERSIH, SANITASI, JALAN DAN JEMBATAN, PENANGANAN PREVALENSI STUNTING, PENATAAN LOS PASAR, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BAANG/JASA, PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN HOLTIKULTURA, SERTA PENINGKATAN SKALA USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL. DISAMPING ITU UNTUK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DILAKUKAN STRATEGI BERUPA PERBAIKAN BASIS DATA KEMISKINAN AGAR INTERVENSI PROGRAM TEPAT SASARAN, PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI PROGRAM BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN, MEMBERIKAN PELATIHAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KERJA AGAR MAMPU BERSAING DIPASAR KERJA, SERTA PROGRAM LAINNYA YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN.

2. TERHADAP SARAN MASUKAN YANG DIBERIKAN TERKAIT UPAYA-UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAD BAIK SECARA INTENSIFIKASI MAUPUN EKSTENSIFIKASI KAMI SANGAT SEPENDAPAT. DAPAT DISAMPAIKAN JUGA

BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TELAH MELAKUKAN BEBERAPA UPAYA MENINGKATKAN PAD DIANTARANYA PENGGALIAN POTENSI OBJEK PAJAK BARU MELALUI PENDATAAN, KERJASAMA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, PENERAPAN DIGITALISASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH SERTA PENGAWASAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN.

3. TERHADAP SARAN MASUKAN YANG DIBERIKAN TERKAIT BELANJA HIBAH DAN BANSOS AGAR MENGACU PADA PENCAPAIAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PENGANGGARAN DANA HIBAH DAN BANSOS BERDASARKAN ATAS USULAN PROPOSAL MASYARAKAT YANG DIVERIFIKASI OLEH SKPD LEADING SEKTOR DAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. FORMULASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

II. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA,

1. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN ATAS TARGET PENDAPATAN MAUPUN BELANJA YANG BELUM TEREALISASI UNTUK DAPAT DICARIKAN JALAN KELUAR TERBAIK, PADA PRINSIPNYA KAMI SEPENDAPAT. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH ATAS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TELAH MENGELOLAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH. PENYERTAAN MODAL DAERAH DILAKSANAKAN DALAM BENTUK PEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA LAINNYA. TERHADAP BELUM OPTIMALNYA

PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PROSES PENAGIHAN TELAH DILAKUKAN DARI SURAT TAGIHAN I, II, DAN III, DENGAN MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN MENGELOUARKAN KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. TENTUNYA UPAYA PENAGIHAN AKAN TERUS DILAKUKAN DAN DITINGKATKAN AGAR PIUTANG PAJAK DAERAH DAPAT DITAGIH SECARA MAKSIMAL.. DAN TERKAIT ADANYA PENGANGGARAN BELANJA DAERAH YANG KURANG DARI 70% DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA HAL ITU TERJADI KARENA EFISIENSI BELANJA YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN SERTA EFISIENSI HARGA.

2. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN TERKAIT DENGAN PENERAPAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH AGAR DITUNTASAKAN, KAMI SANGAT SEPENDAPAT. ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH TELAH TERUS DIUPAYAKAN MELALUI DIGITALISASI SISTEM, DAN DIGITALISASI PEMBAYARAN. TENTUNYA PENERAPAN DIGITALISASI TETAP MEMPERTIMBANGKAN PENERAPAN YANG PALING EFEKTIF DISERTAI DENGAN PENGAWASAN YANG MEMADAI SEHINGGA MAMPU MENCEGAH KEBOCORAN SECARA OPTIMAL.
3. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN ATAS KEBERADAAN SEKOLAH FAVORIT DI KABUPATEN BULELENG AGAR LEBIH MERATA DENGAN CARA MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH SERTA MENDISTRIBUSIKAN GURU-GURU PENGGERAK KAMI SANGAT SEPENDAPAT, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PENDIDIKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA. MENCERMATI FENOMENA PPDB, DIMANA ADA BEBERAPA SEKOLAH YANG MENJADI PILIHAN FAVORIT MASYARAKAT TIDAK BISA KITA PUNGKIRI. AKAN TETAPI FENOMENA INI ADALAH FENOMENA TRANSISI DARI PERUBAHAN SISTEM PPDB YANG DULU MENGGUNAKAN SISTEM NILAI UJIAN ATAU TES POTENSI AKADEMIK UNTUK DITERIMA DI SEKOLAH TERTENTU KINI DIUBAH

MENJADI BEBERAPA JALUR, SEPERTI JALUR ZONASI, JALUR AFIRMASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA DAN PRESTASI. PERUBAHAN SISTEMINI BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KESAMAAN DAN PEMERATAAN PELAYANAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SELURUHWILAYAH DAN SELURUH MASYARAKAT. UNTUK MEMPERCEPAT PEMERATAAN LAYANAN INI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TELAH MENG-UPGRADE SEKOLAH-SEKOLAH SECARA BERTAHAP AGAR DAPAT MENGURAI KEPADATAN DI BEBERAPA SEKOLAH YANG MENJADI FAVORIT MASYARAKAT YAITU DENGAN MENGUPAYAKAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASANA TERMASUK DIGITALISASI PENDIDIKAN SECARA BERTAHAP SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN MENDORONG PARA GURU UNTUK MENGIKUTI PROGRAM GURU PENGGERAK.. HAL INI KITA HARAPKAN AKAN DAPAT TERSELESAIKAN DENGAN BAIK SEIRING TUMBUHNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PROSES PEMBELAJARAN YANG NYAMAN, AMAN DAN MENYENANGKAN BAGI ANAK-ANAK KITA.

4. SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI SD NEGERI 6 BONDALEM KECAMATAN TEJAKULA YANG RUSAK BERAT, KAMI SEPENDAPAT UNTUK SEGERA DISELESAIKAN PADA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023.
5. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN TERKAIT KEGIATAN LOMBA SAPI GERUMBUNGAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT MEMELIHARA SAPI YANG BERKUALITAS DISAMPING JUGA MELESTARIKAN BUDAYA KAMI SANGAT SEPENDAPAT DAN TELAH DIAGENDAKAN DALAM KEGIATAN LOVINA FESTIVAL.

III. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT,

1. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN YANG MENDORONG PEMERINTAH BERSIKAP REALISTIK DAN VISIONER DALAM MENARGETKAN PEROLEHAN PAD, PADA PRINSIPNYA KAMI SEPENDAPAT.

2. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN UNTUK DAPAT MEMAKSIMALKAN POTENSI PAD DARI RETRIBUSI PARKIR AGAR BISA MENCAPAI TARGET, PADA PRINSIPNYA KAMI SEPENDAPAT. UPAYA-UPAYA TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SALAH SATUNYA PENERAPAN ELEKTRONIFIKASI PARKIR YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP, TERMASUK JUGA AKAN MELAKUKAN KAJIAN LEBIH MENDALAM TERKAIT POTENSI RETRIBUSI PARKIR.
4. TERKAIT DENGAN ADANYA EFISIENSI BELANJA YANG TERCERMIN PADA REALISASI BELANJA SEBESAR 92,96% DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH SUDAH SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH, DIMANA ALOKASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL, MANDATORY SPENDING SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU, SERTA PEMENUHAN PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BULENG YANG TERTUANG DALAM RKPD TELAH TERPENUHI.
5. TERKAIT DENGAN SERAPAN BELANJA MODAL SEBESAR 86,41% DAN DISISI LAIN ADANYA BEBERAPA INFRASTRUKTUR YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL BERDASARKAN ATAS HASIL PENGADAAN BARANG/JASA DIMANA SISA ALOKASI ANGGARAN TERUTAMA YANG BERSUMBER DARI DANA TERARAH SEPERTI DAK FISIK TIDAK BISA DIALOKASIKAN UNTUK PAKET PEKERJAAN YANG BARU DITAHUN BERKENAN. KAMI JUGA SEPENDAPAT BEBERAPA INFRASTRUKTUR YANG MASIH RUSAK HARUS MENDAPAT PENANGANAN AGAR BISA MEMBERIKAN KENYAMANAN BAGI MASYARAKAT. BEBERAPA INFRASTRUKTUR TELAH DILAKUKAN PENANGANAN DI TAHUN 2023 SEPERTI PENANGANAN JALAN PUTUS DI DESA BAKUNG, PENGERUKAN SEDIMEN DAN PELEBARAN SALURAN DRAINASE KALI MUMBUL UNTUK PENANGANAN BANJIR DI KAMPUNG ANYAR, SERTA PEMELIHARAN

SARANA PRASARANA DI PELABUHAN BULELENG. DAN BEBERAPA INFRASTRUKTUR YANG BELUM TERTANGANI DI TAHUN 2023, AKAN MENJADI PERHATIAN DAN DITANGANI SECARA BERTAHAP PADA TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA. KAMI JUGA MENGAJAK SELURUH PIHKU UNTUK BERSAMA-SAMA MENGAWAL PROGRAM PENANGANAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BULELENG AGAR DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.

IV. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT,

1. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN DALAM UPAYA MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN, MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN, MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENEKAN LAJU INFLASI, PADA PRINSIPNYA KAMI SEPENDAPAT DAN AKAN MENJADI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PADA TAHUN BERIKUTNYA SEHINGGA CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO SEMAKIN BAIK.
2. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI BAHWA PERLU ADANYA PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH AGAR TIDAK TERJADI KEBOCORAN YANG TIDAK DIINGINKAN, KAMI SANGAT SEPENDAPAT. SALAH SATU LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MEMADAI DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN YAITU MELAKSANAKAN PROGRAM DIGITALISASI SISTEM DAN DIGITALISASI PEMBAYARAN YANG TERUS DIGALAKKAN SEHINGGA PENGELOLAAN PENDAPATAN SEMAKIN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA DAPAT SECARA EKTIF MENCEGAH KEBOCORAN.
3. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN AGAR MENDAFTARKAN KEPESENTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI TENAGA HARIAN LEPAS (THL) DAN PEMBERIAN UANG BEBAN KERJA PADA BEBERAPAT TENAGA HARIAN LEPAS KHUSUS, DAPAT KAMI JELASKAN

BAHWA TENAGA HARIAN LEPAS TELAH DIDAFTARKAN MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN SERTA PEMBAYARAN IURANNYA TELAH DIANGGARKAN PADA APBD SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. TERKAIT DENGAN PEMBERIAN UANG BEBAN KERJA PADA BEBERAPA TENAGA HARIAN LEPAS AKAN KAMI KAJI DAN PERTIMBANGKAN DALAM UPAH HARIAN YANG DIBAYARKAN.

4. TERKAIT BIAYA PENGURUSAN JENAZAH DAN BIAYA AMBULANS BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RSUD YANG DIRASA MASIH MEMBERATKAN MASYARAKAT, AKAN KAMI JADIKAN PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD YANG SAATINI MASUK MENJADI MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
5. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN TERKAIT PENERANGAN JALAN DI SEPANJANG JALAN BARU DI SHORTCUT DENPASAR-SINGARAJA PADA PRINSIPNYA KAMI SEPENDAPAT. UNTUK HAL TERSEBUT, PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TELAH MELAKUKAN KOORDINASI SECARA INTENS DENGAN DIRJEN BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR – BALI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI BALI DAN TELAH DILAKUKAN KAJIAN SECARA TEKNIS OLEH INSTANSI YANG BERWENANG. KEDEPAN, UNTUK TETAP MENINGKATKAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN, KAMI AKAN TERUS MENJALIN KOMUNIKASI KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI YANG BERWENANG.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
DEMIKIAN YANG DAPAT DISAMPAIKAN SEBAGAI PENJELASAN ATAS MASUKAN DAN PANDANGAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DALAM PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

YANG KAMI AJUKAN. SEGALA SARAN DAN MASUKAN JUGA KAMI HARAPKAN DALAM PEMBAHASAN-PEMBAHASAN SELANJUTNYA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

AKHIR KATA KAMI MOHON MAAF APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM

"WASSALAM MUALAIKUM WARAMATULLAHI WABARAKATUH"

"SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA."

PENJABAT BUPATI BULELENG,

TTD

KETUT LIHADNYANA